



BUPATI SEMARANG

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.2 / 6867 TAHUN 2025
TENTANG
TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG YANG
MENDELEGASIKAN PENETAPAN PERATURAN BUPATI

Dalam rangka tertib administrasi serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti ketentuan peraturan daerah yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan bupati guna menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan dan percepatan pelayanan publik.

3. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi atas pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini harus melakukan percepatan penyusunan rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam proses penyusunan, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang untuk memastikan kesesuaian tahapan pembentukan, teknis penyusunan dan materi muatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 3 September 2025



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang; dan
 3. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang.
-

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN BUPATI
 SEMARANG
 NOMOR: 100.3.4.2 / 6867 /2025
 TENTANG
 TINDAK LANJUT PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN
 SEMARANG YANG
 MENDELEGASIKAN PENETAPAN
 PERATURAN BUPATI

DAFTAR PERATURAN DAERAH YANG MENGAMANATKAN
 PERATURAN BUPATI YANG BELUM ADA TINDAK LANJUT

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL PERATURAN DAERAH	JUMLAH PASAL YANG MENGAMANATKAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	4 Pasal
		Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	12 Pasal
2	Dinas Perhubungan	Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	47 Pasal
3	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian Dan Sektor Perikanan	3 Pasal
4	Dinas Pekerjaan Umum	Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	4 Pasal
		Nomor 3 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung	16 Pasal
		Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023 – 2043	1 Pasal
		Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	2 Pasal
		Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan	1 Pasal
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	6 Pasal
		Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	8 Pasal

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL PERATURAN DAERAH	JUMLAH PASAL YANG MENGAMANATKAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang	1 Pasal
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelian dan Toko Swalayan	8 Pasal
		Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	6 Pasal
		Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan	2 Pasal
		Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	1 Pasal
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nomor 10 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa	6 Pasal
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga	5 Pasal
		Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	6 Pasal
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	13 Pasal
		Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Pasal
11	Dinas Sosial	Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	3 Pasal
12	Dinas Kesehatan	Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit	4 Pasal
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	8 Pasal
		Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	4 Pasal
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	2 Pasal
		Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Pasal

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL PERATURAN DAERAH	JUMLAH PASAL YANG MENGAMANATKAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
		Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	6 Pasal
15	Dinas Pariwisata	Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	6 Pasal
16	Badan Keuangan Daerah	Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	5 Pasal
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Pasal
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nomor 10 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika	1 Pasal
19	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah	6 Pasal
20	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	6 Pasal



BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA